

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA LANGSUNG DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2017

Fadhila Yuniar Rachmawati, Haryanto¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

ABSTRACT

The results of this study indicate that the General Allocation Fund (DAU) and Regional Original Revenue (PAD) have a positive and significant effect, while the Special Allocation Fund (DAK) has a non-significant result of Direct Expenditure. The aim of this study is to find out which income can be extracted in order to increase public welfare and regions with direct expenditure.

Keywords: General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Direct Expenditures, Local Government.

PENDAHULUAN

Di era reformasi sekarang ini, pembangunan daerah memang diperlukan dan penting adanya untuk dilakukan dan perlu ditingkatkan adanya pembangunan daerah. Dikarenakan adanya pembangunan daerah tersebut merupakan bagian yang terstruktur dari terwujudnya pembangunan nasional, sehingga pembangunan daerah pada era reformasi ini tidak dapat lepas dari adanya prinsip otonomi daerah. Dengan terselenggaranya otonomi daerah, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota memiliki hak kekuasaan dan cara tersendiri yang sesuai dengan aturan untuk menyelenggarakan dan mengembangkan program pembangunan untuk meningkatkan program penjaminan ekonomi rakyat yang diprogramkan dari pemerintah pusat.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah guna meningkatkan kemandirian dan kemampuan daerahnya dapat ditempuh dengan cara potensi penerimaan di daerahnya perlu di optimalkan. Sumber penerimaan daerah terdiri dari berbagai dana yaitu Dana Perimbangan yang didalamnya berisi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, ada juga penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah serta Pinjaman Daerah. Halim (2009), tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengakibatkan alokasi anggaran belanja perlu diberikan yang lebih besar oleh pemerintah untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini sangat berkaitan dengan belanja langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap tahunnya dan dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan jasa kepada masyarakat setempat seperti adanya pengadaan barang dan jasa dalam rangka perbaikan jalan, jembatan, irigasi dan lainnya, (Hidayah & Hari, 2014).

Sumber dana pengalokasian belanja dalam APBD adalah pendapatan asli daerah (PAD). PAD merupakan salah satu indikator pengukuran keberhasilan otonomi daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin tingginya PAD suatu daerah diharapkan mampu meningkatkan investasi belanja langsung pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan semakin baik.

¹ Corresponding author

Dengan terselenggaranya otonomi daerah dimaksudkan untuk menuntut Pemerintah Daerah mengatur pemerintahannya secara mandiri, termasuk mandiri dalam masalah keuangan pemerintah. Meskipun begitu, pemerintah pusat tetap memberikan dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk diwujudkan otonomi daerah. Menurut Maimunah (2006) tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Dana bantuan tersebut merupakan dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam pelaksanaan praktik pemerintahannya, transfer dana bantuan yang diberi oleh pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan pemerintah daerah yang paling utama untuk membiayai dan melaksanakan operasional daerahnya. Selain itu terdapat penerimaan dana lainnya dari pemerintah pusat, yaitu dana alokasi khusus dimana dana ini adalah dana untuk pemerintah daerah yang sumber penerimaannya berasal dari dana APBN yang merupakan dana untuk mendanai pelaksanaan kegiatan khusus untuk mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan daerah. DAK dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan khusus, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar yang telah ditetapkan atau untuk mendorong agar cepat terselesaikannya pembangunan daerah (Hidayah & Hari, 2014).

Tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di semua pemerintah daerah di Indonesia adalah alokasi APBD untuk belanja modal yang telah diserap untuk pengeluaran rutin yang relatif kurang produktif. Pemerintah daerah cenderung mengalokasikan lebih banyak pendapatannya untuk kebutuhan operasional yang mengakibatkan tidak memadainya dana untuk membiayai belanja langsung. Alokasi sumber daya ke dalam anggaran belanja modal sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik berupa fasilitas umum dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun kenyataannya, efektivitas dan efisiensi belanja ke daerah masih dinilai rendah karena pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal.

Pemilihan penelitian di Jawa Tengah mempunyai alasan tersendiri. terdapat data yang diperoleh bahwa realisasi belanja langsung terhadap belanja daerah di Jawa Tengah tergolong lebih sedikit dibanding DKI Jakarta dan Jawa Timur. Diperoleh hasil dari perhitungan bahwa selama 5 tahun terakhir ini, realisasi belanja langsung di Jawa Tengah hanya sebesar 0.262 terhadap belanja daerah, sedangkan di DKI Jakarta sebesar 0.526 dan Jawa Timur sebesar 0.270. Berikut adalah tabel rasio realisasi belanja langsung terhadap belanja daerah di Provinsi yang ada di Pulau Jawa :

Tabel 1.2 Rasio Realisasi Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah

No.	Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	DKI Jakarta	0.609	0.666	0.485	0.467	0.404	0.526
2	Jawa Barat	0.167	0.162	0.211	0.197	0.135	0.174
3	Jawa Tengah	0.247	0.263	0.288	0.274	0.238	0.262
4	DI Yogyakarta	0.326	0.382	0.407	0.169	0.396	0.336
5	Jawa Timur	0.276	0.268	0.301	0.281	0.223	0.270

Sumber : data diolah

Belanja Daerah digunakan untuk membiayai segala pelaksanaan urusan pemerintah yang sudah menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota dimana pelaksanaan urusan tersebut terdiri dari urusan yang bersifat wajib, urusan yang bersifat pilihan, dan urusan yang memiliki penanganannya di sektor tertentu dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan antar pemerintah pusat dan daerah. Belanja urusan yang bersifat wajib ini dilaksanakan guna melindungi dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat untuk dipenuhinya kewajiban daerah dan diwujudkan dalam bentuk kesehatan, fasilitas umum dan sosial, serta pendidikan yang dapat dipergunakan serta perkembangan system jaminan sosial. Penelitian ini melihat seberapa besar kontribusi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap

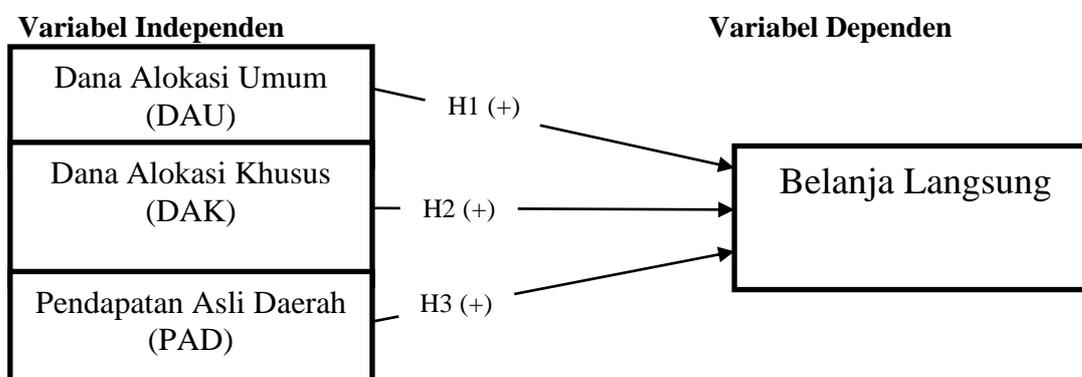
Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah yang belum dapat memberikan pemerataan kebutuhan, fasilitas, dan pelayanan untuk masyarakat di daerah kabupaten/kota di provinsi tersebut.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Dalam menjalankan kewenangan dan kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus menggali segala potensi-potensi yang bisa didapatkan guna membiayai segala pendanaan untuk pembangunan daerahnya.

Penelitian ini memeriksa pengaruh dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja langsung pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini digambarkan dalam gambar 1.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 1 menggambarkan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Garis lurus yang tergambar di Gambar 1 mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh langsung antara variabel independen dengan variabel dependen.

Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Langsung

Menurut teori akuntabilitas, hubungan akuntabilitas dalam konteks DAU dapat dilihat dari kontribusi penggunaan DAU terhadap belanja langsung guna mengontrol penggunaannya dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Hubungan pelaksanaan akuntabilitas antara yang mempunyai wewenang yang lebih tinggi, yang melaksanakan wewenang, serta pelanggan menunjukkan bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui alokasi belanja langsung. DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja langsung guna membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kaitannya dengan DAU merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah berupa transfer yang cukup signifikan di dalam APBN mengakibatkan pemerintah daerah dapat secara leluasa menggunakan DAU (DJP RI, 2017). Dana tersebut dapat digunakan untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat atau dapat disalahgunakan untuk keperluan lain yang tidak penting. Berdasarkan penelitian empiris yang telah dilakukan oleh (Hidayah & Hari, 2014) mengungkapkan

bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja langsung. Di sisi lain, penelitian Meianto et al (2013) menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Dari uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung.

Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Langsung

Salah satu dana yang bersumber dari APBN adalah DAK, dimana dana tersebut diberikan kepada pemerintah daerah dan dialokasikan guna melakukan pembiayaan kegiatan yang bersifat khusus, dimana kegiatan tersebut menjadi urusan daerah itu sendiri dan kepentingan nasional. Hubungan akuntabilitas dalam PAD dapat dilihat dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan tujuan otonomi daerah, yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memajukan perekonomian daerah melalui alokasi belanja langsung. DAK dimanfaatkan untuk kegiatan investasi pembangunan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik yang menyebabkan bertambahnya umur ekonomis sarana dan prasarana tersebut.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tiap daerah kabupaten dan kota berbeda-beda dan penggunaannya hanya untuk tujuan tertentu saja dan tidak digunakan untuk Belanja Langsung. Pemanfaatan DAK ini bertujuan untuk belanja kebutuhan tertentu yang mempunyai sifat khusus, seperti bencana alam, banjir, dan sebagainya, (Hidayah & Hari, 2014). Penelitian Setiawan (2015) memperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian Hidayah & Hari (2014) berhasil membuktikan bahwa DAK berpengaruh negative terhadap belanja langsung. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung.

Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Langsung

Pelaksanaan kebijakan sebagai daerah otonomi yang merupakan kewenangan milik pemerintah daerah, sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar PAD yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi. Hubungan akuntabilitas dalam PAD dapat dilihat dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan tujuan otonomi daerah, yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memajukan perekonomian daerah melalui alokasi belanja langsung. Pemerintah memberikan informasi mengenai laporan penerimaan PAD di daerahnya. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan menyediakan infrastruktur yang memadai bagi daerah dan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja langsung.

Terdapat hubungan antara PAD dengan belanja langsung, namun tidak semua daerah bisa mendapatkan penerimaan PAD yang tinggi. Hidayah & Hari (2014) memperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Begitu juga dengan Setiawan (2015), yang mengungkapkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Semakin tinggi PAD yang diperoleh, maka semakin tinggi juga pendapatan yang dialokasikan untuk belanja modal. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi dan menjadi akibat karena eksistensi dari variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Langsung. Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 36 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung merupakan belanja yang dapat dianggarkan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanjanya yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

Kompensasi yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang bekerja untuk pemerintah tetapi belum memiliki status sebagai PNS atau yang disebut sebagai honorarium sebagai balasan atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh pegawai tersebut dimana pembentukan modal berkaitan dengan pekerjaan yang pegawai honorarium itu lakukan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang memiliki nilai manfaat kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

3. Belanja Modal

Anggaran yang dimaksudkan guna memperoleh aktiva tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan. Nilai yang diperoleh dari pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut memiliki nilai sebesar harga beli/bangun aset tersebut.

Variabel independen pada penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 adalah dana dari pemerintah pusat yang berasal dari APBN dimana dana tersebut dialokasikan ke pemerintah daerah dengan tujuan untuk pemerataan kesenjangan fiskal antar daerah untuk membiayai kebutuhan yang dikeluarkan oleh masing-masing daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bertujuan untuk melakukan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing (Hidayah & Hari, 2014).

Berdasarkan UU RI no.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, rumus DAU yang dimaksud pada ayat ini adalah:

$$\text{Jumlah umum untuk daerah provinsi} = \frac{\text{bobot daerah provinsi yang bersangkutan}}{\text{jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi}}$$

Sedangkan rumus DAU untuk kabupaten/kota tertentu adalah :

$$\text{jumlah umum untuk daerah kabupaten/kota} = \frac{\text{bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan}}{\text{jumlah bobot dari seluruh daerah kabupaten/kota}}$$

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, DAK merupakan dana yang sumber penerimaannya dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di daerah tersebut yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat dari jumlah dana perimbangan yang tercantum dalam Laporan Realisasi APBD, (Ardhani, 2011).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan daerah asli yang digali potensi daerah tersebut yang dapat digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan salah satu bentuk usaha daerah untuk tidak menggantungkan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. PAD sendiri komponennya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba hasil usaha BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. Perhitungan rumus PAD adalah :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) = hasil pajak daerah + retribusi daerah + laba hasil usaha BUMD + pendapatan lain-lain yang sah

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota yang berada di provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 kabupaten/kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pada tahun 2013-2017.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang didapat dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Perolehan data tersebut dapat diakses dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di internet (www.djpk.depkeu.go.id). Data tersebut juga dapat diperoleh dari BPK Provinsi Jawa Tengah. Di dalam laporan Realisasi APBD ini tercantum mengenai jumlah realisasi Belanja Langsung, PAD, DAU dan DAK.

Metode Analisis

Analisis data dilakukan dengan tahapan pengujian sebagai berikut :

- a. Statistik Deskriptif, digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tentang variabel yang diteliti.
- b. Uji Asumsi Klasik. (i) Uji Normalitas Data, bertujuan untuk menguji apakah variabel yang diteliti terdistribusi secara normal.; (ii) Uji Multikolinieritas, bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya hubungan linier antar variabel bebas.; (iii) Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan- pengamatan lain.; (iv) Uji Autokorelasi, bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu periode sebelumnya.; (v) Uji Koefisien Determinasi Berganda. Digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi atau pengaruh variabel bebas terhadap variasi naik turunnya variabel dependent.; (vi) Uji Hipotesis terdiri dari: (a) Uji F, digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependent.; (b) Uji t, digunakan untuk menentukan apakah koefisien dari variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel dependent.; (c) Analisis Regresi Berganda, diformulasikan model regresi berganda sebagai berikut.

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Dimana:

Y = Belanja Langsung;

a = Nilai intersep (konstanta);

X1 = Dana Aokasi Umum;

X2 = Dana Alokasi Khusus;

X3 = Pendapatan Asli Daerah;

e = Error.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa bagian tengah, ibu kotanya adalah Semarang. Jawa Tengah sendiri berbatasan dengan Jawa Barat di bagian Barat, DIY dan Samudra Hindia di bagian selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa berada di bagian utara Jawa Tengah. Rincian objek penelitian ada pada tabel berikut :

Tabel 1 Objek Penelitian

No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Banjarnegara
2	Kabupaten Banyumas
3	Kabupaten Batang
4	Kabupaten Blora
5	Kabupaten Boyolali
6	Kabupaten Brebes
7	Kabupaten Cilacap
8	Kabupaten Demak
9	Kabupaten Grobogan
10	Kabupaten Jepara
11	Kabupaten Karanganyar
12	Kabupaten Kebumen
13	Kabupaten Kendal
14	Kabupaten Klaten
15	Kabupaten Kudus
16	Kabupaten Magelang
17	Kabupaten Pati
18	Kabupaten Pekalongan
19	Kabupaten Pemasang
20	Kabupaten Purbalingga
21	Kabupaten Purworejo
22	Kabupaten Rembang

23	Kabupaten Semarang
24	Kabupaten Sragen
25	Kabupaten Sukoharjo
26	Kabupaten Tegal
27	Kabupaten Temanggung
28	Kabupaten Wonogiri
29	Kabupaten Wonosobo
30	Kota Magelang
31	Kota Pekalongan
32	Kota Salatiga
33	Kota Semarang
34	Kota Surakarta
35	Kota Tegal

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran (deskripsi) atas data penelitian yang dapat menunjukkan nilai maksimum, minimum, standar deviasi, dan mean. Berdasarkan tabel 4.2, hasil dari analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa total sampel (N) dalam penelitian berjumlah 168. Terdapat 7 data yang di outlier, yaitu data pada Kab. Cilacap tahun 2016, Kab. Kudus tahun 2016, Kab. Tegal tahun 2015, Kab. Wonogiri tahun 2013, Kota Pekalongan tahun 2014 dan 2016, serta Kota Semarang tahun 2016. Dikarenakan terdapat data yang ekstrim sehingga data tidak terdistribusi secara normal.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	168	358.331.867.000	1.398.539.653.000	900.805.386.839	235.437.630.385
DAK	168	3.750.100.000	449.360.479.699	141.557.382.629	116.412.389.114
PAD	168	95.192.786.972	1.791.886.378.674	288.914.558.288	213.589.566.220
Blj Lgsg	168	508.092.759.200	4.267.356.234.098	1.526.639.961.212	516.478.684.449
cDAU	168	0.28	0.82	0.6030	0.08246
cDAK	168	0.003	0.24	0.0885	0.05986
cPAD	168	0.08	0.42	0.1815	0.06099

Sumber: Output SPSS, data sekunder yang diolah 2018

Keterangan:

- DAU = Dana Alokasi Umum
DAK = Dana Alokasi Khusus
PAD = Pendapatan Asli Daerah
Blj Lgsg = Belanja Langsung
cDAU = Kontribusi DAU terhadap Belanja Langsung
cDAK = Kontribusi DAK terhadap Belanja Langsung
cPAD = Kontribusi PAD terhadap Belanja Langsung

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Dari seluruh uji asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- i. Uji normalitas dengan uji *kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,200 untuk masing-masing model regresi. Hal tersebut menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal dikarenakan nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05.
- ii. Uji multikolonieritas menunjukkan nilai toleransi seluruh variabel lebih besar dari 0,10 dan memiliki nilai VIF dibawah 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antara variabel independen dan kontrol di dalam model regresi.
- iii. Uji heteroskedasitas dengan grafik *scatterplot* menunjukkan persebaran titik-titik pada grafik yang tidak menunjukkan pola tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk penelitian.
- iv. Uji autokorelasi dengan uji autokorelasi ini menunjukkan nilai test sebesar 0.00001 dengan probabilitas 0.063. Sehingga dengan pengujian ini dapat disimpulkan bahwa residual random tidak terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian menggunakan uji regresi berganda. Hasil uji yang telah dilakukan ditampilkan pada tabel 5.

Tabel 3
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Arah	B	Signifikansi	Kesimpulan
H1	+	0.006	0.000	Diterima
H2	+	0.004	0.323	Ditolak
H3	+	0.002	0.000	Diterima

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2018

Berdasarkan tabel di atas, apabila nilai probabilitas menunjukkan angka kurang dari 0,1 maka hasil uji regresi dapat dikatakan mendukung hipotesis penelitian. Hasil uji statistik f menunjukkan nilai *p-value* masing-masing sebesar 0,000, 0,323, dan 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa H1 dan H3 diterima sedangkan H2 ditolak. Hasil uji koefisien determinasi pada uji regresi yang menunjukkan nilai *adjusted R square* pada seluruh model regresi sebesar 0.941 yang menunjukkan bahwa variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah sebesar 94,1% sisanya 5,9% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel independen.

Interprestasi Hasil

Hipotesis 1

Hipotesis pertama penelitian ini adalah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2017. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai koefisien beta sebesar 0.006. Dengan nilai koefisien beta sebesar 0.006 dapat dikatakan bahwa apabila nilai DAU mengalami kenaikan 1 kesatuan maka akan meningkatkan belanja langsung sebesar 0.006. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh secara signifikan dengan arah hubungan yang positif terhadap alokasi belanja modal, yang artinya hipotesis ini diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Hidayah & Hari (2014) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung dengan arah hubungan negatif. Hasil ini menjelaskan bahwa apabila DAU mengalami peningkatan maka akan mengakibatkan tingkat alokasi belanja modal mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila DAU mengalami penurunan maka tingkat alokasi belanja langsung daerah juga mengalami penurunan. Penelitian Nurlis (2016); Yovita (2011) menyatakan bahwa, hal ini dapat terjadi karena DAU lebih banyak digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja lainnya. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah cenderung menggunakan DAU untuk membiayai pengeluaran rutin daerah seperti untuk pengeluaran belanja pegawai dibandingkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Belanja Pegawai merupakan salah satu komponen dari belanja langsung. Dari hasil penghitungan kontribusi DAU terhadap belanja langsung diperoleh rata-rata sebesar 0.603, yang artinya pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ini rata-rata perolehan dana untuk penggunaan belanja langsung di dapat dari DAU. Dengan hasil maksimum sebesar 0.82 pada Kab. Magelang tahun 2013 dan hasil minimumnya sebesar 0.28 pada Kota Semarang tahun 2017.

Hipotesis 2

Hipotesis kedua penelitian ini adalah dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja langsung Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2017. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai koefisien beta sebesar 0.004. Dengan nilai koefisien beta sebesar 0.004 dapat dikatakan bahwa apabila nilai DAK mengalami kenaikan 1 kesatuan maka akan meningkatkan belanja langsung sebesar 0.004. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung, yang artinya hipotesis ini ditolak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Setiawan (2017) dimana DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal. Penelitian Mochamad Fauzie Farid (2004) menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh karena alokasi DAK di tiap-tiap kota dan kabupaten berbeda beda dan penggunaannya hanya untuk tujuan tertentu saja dan tidak di gunakan untuk belanja langsung melainkan untuk belanja tertentu yang sifatnya khusus seperti bencana alam, banjir dan sebagainya. DAK dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan khusus, khususnya untuk pembiayaan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat yang belum mencapai standar yang telah ditetapkan atau untuk mendorong agar cepat terselesaikannya pembangunan daerah. Hal ini berarti DAK tidak memiliki peran yang signifikan dalam realisasi anggaran belanja langsung di Jawa Tengah.

Tidak berpengaruhnya DAK terhadap alokasi belanja langsung dikarenakan data perolehan DAK di Jawa Tengah mengalami angka yang tidak stabil. Contohnya pada Kab. Tegal mengalami kenaikan dan penurunan di tahun yang berbeda. Pada tahun 2014 penerimaan DAK mengalami penurunan sebesar 8,878,087,000.00 dari tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2016 penerimaan DAK mengalami kenaikan yang cukup pesat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 222,100,024,983.00. Berdasarkan data hasil penghitungan kontribusi penggunaan DAK terhadap belanja langsung diperoleh rata-rata penggunaannya yang kecil, yaitu hanya sebesar 0.089 atau 8.9%.

Hipotesis 3

Hipotesis ketiga penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja langsung Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2017. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai koefisien beta sebesar 0.002. Dengan nilai koefisien beta sebesar 0.002 dapat dikatakan bahwa apabila nilai PAD mengalami kenaikan 1 kesatuan maka akan meningkatkan belanja langsung sebesar 0.002. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendapatan

asli daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja langsung, yang artinya hipotesis ini diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Hidayah & Hari (2014) dimana pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja langsung. PAD merupakan ukuran produktivitas pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh inovasi pemerintah daerah dalam mengembangkan aset produktif. PAD merupakan dana yang bersumber dari daerah itu sendiri, yang bersal dari pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha milik daerah, dan pendapatan lainnya yang sah. PAD mempunyai peran yang strategis di dalam keuangan daerah, karena sumber pendapatan daerah ini merupakan sumber utama penyangga untuk membiayai kehidupan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi dari besarnya PAD mampu meningkatkan alokasi belanja langsung di Jawa Tengah. Adanya pengaruh PAD terhadap alokasi belanja langsung ini disebabkan karena sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mengandalkan PAD yang nilainya cukup besar untuk membiayai semua pembiayaan dan belanja daerah terutama belanja langsung. Contohnya pada Kota Semarang realisasi PAD dan Belanja Langsung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 PAD Kota Semarang sebesar 925,919,310,506.00, pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 1,138,367,228,493.00, di tahun 2015 mengalami kenaikan lagi menjadi 1,201,581,778,459.00, tahun 2016 diperoleh PAD sebesar 1,491,645,900,065.00, dan tahun 2017 meningkat lagi dan diperoleh sebesar 1,791,886,378,674.00. Dengan perolehan PAD tersebut, PAD yang di peroleh di Kota Semarang berkontribusi untuk penggunaan belanja langsung dengan rata-rata sebesar 0.393.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan membuktikan apakah terdapat pengaruh dari DAU, DAK, dan PAD terhadap Belanja Langsung pada pemerintah daerah kabupaten atau kota di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian dan pembahasan pada bab 4, maka dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel DAK tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Langsung dengan hasil signifikansi sebesar 0.323, tetapi untuk variabel lainnya yaitu DAU dan PAD memberikan pengaruh signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap Belanja Langsung pada pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017.
2. Hasil penelitian secara simultan atau bersama-sama menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan dengan signifikansi sebesar 0.000 terhadap Belanja Langsung pada pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017.

3. Nilai Adjusted R Square (R^2) atau Koefisien Determinasi adalah 0.941 yang berarti 94.1% Belanja Langsung mampu diprediksi oleh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan presentasi hasil 5.9% lainnya dapat dipengaruhi oleh pengaruh atau sebab lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini antara lain

1. Variabel yang mempengaruhi penggunaan Belanja Langsung dalam penelitian ini hanya terdiri dari 3 variabel, yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan masih banyak faktor lain yang mampu mempengaruhi pengalokasian belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada periode 2013-2017.
4. Pada penelitian ini penulis belum bisa mendapatkan data pendukung berupa berapa besarkah muatan politis yang terkandung pada saat penetapan APBD oleh DPRD.

Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka terdapat beberapa hal yang disarankan terkait dengan penelitian ini, antara lain :

1. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat menambah variasi variabel yang digunakan, dengan menambah variabel independen lainnya yang masih berkaitan, seperti jenis penerimaan daerah lainnya yaitu penerimaan pembiayaan APBD, Dana Bagi Hasil (DBH), SiLPA, maupun variabel non keuangan seperti pertumbuhan ekonomi, luas wilayah, banyaknya penduduk, dll.
 2. Menggunakan sampel pada Pemerintah Kabupaten/Kota di daerah yang lain yang belum pernah diteliti dengan melihat permasalahan pemerintahannya.
 3. Menambah rentang waktu periode penelitian agar mampu melakukan generalisasi atas hasil tersebut.
 4. Mencari data pendukung berupa besaran muatan politis yang terkandung pada saat penetapan APBD oleh DPRD.
-

REFERENSI

- Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- DJPK RI. (2017). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Ri. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah., (November).
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah, *14*(1), 44–52.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM dan SPSS 21. In *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Pogram iIBM SPSS 21*.
- Hidayah, N., & Hari, S. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah. *XVIII*(01), 45–58.
- Josef Riwo Kaho. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kolinug, F. C., Kumenaung, A. G., & Rotinsulu, D. C. (2017). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kota Manado.
- Maimunah, M. (2006). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera Mutiara, *Simposium*, 23–26.
- Nurdiwaty, D., Zaman, B., & Kristinawati, E. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain- Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur. *17*(1), 43–59.
- Nurlis. (2016). The Factors Affecting Of The Capital Expenditure Allocation Case : The Local Government Of Indonesia, *7*(1), 107–113.
- Prayitno, B. (2017). Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2013-2017, *13*(3), 261–280.
- Rochmatullah, M. R., Hartanto, R., & Arifin, A. (2016). Determinating The Value Of Capital Expenditure Allocation In Indonesia Local Government. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *17*(2), 1411–6081.
- Setiawan, D. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah.
- Setiyawan, H. E., & Safri, M. (2016). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik , Transparansi Publik Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Bungo, *4*(1), 51–72.
- Sidik, M. (2002). “Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah ” 1, (April), 1–14.
- Sunarto, & Sunyoto, Y. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah), (43), 13–22.
- Yovita, F. M. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010), 1–39.
-